KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : KPK cari kaitan Anas dengan proyek gedung baru DPR
Tanggal : Jumat, 25 Oktober 2013
Surat Kabar : Suara Pembaruan
Halaman : 2

KPK Cari Kaitan Anas dengan Proyek Gedung Baru DPR

JAKARTA] Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya bukti berkaitan dengan kasus gratifikasi Hambalang dengan tersangka mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum.

Penelusuran KPK tidak hanya sebatas pada kasus Hambalang, tetapi juga aliran dana Kongres Partai Demokrat di Bandung, serta rencana pembangunan gedung baru DPR. Meskipun gedung yang direncanakan menelan biaya Rp 1 miliar itu akhirnya tak jadi dibangun.

Sumber *SP* mengungkapkan, susah mencari kaitan Anas dengan rencana proyek gedung baru DPR. "Sepertinya KPK sedang mencari-cari data dana logistik Kongres Demokrat di Bandung didapat dari mana saja. Mungkin saja ada kaitannya dengan proyek gedung baru itu," kata sumber *SP* di Jakarta, kemarin.

Keterkaitan tersangka Anas dengan rencana pembangunan gedung baru DPR tersebut terkonfirmasi saat pemeriksaan terhadap Ketua DPR Marzuki Alie.

Marzuki dipanggil KPK, Selasa (22/10). Ia diperiksa terkait Kasus Hambalang dan dugaan politik uang dalam pemilihan Ketua Umum Partai Demokrat pada Kongres 2010, di Bandung.

Marzuki mengungkapkan, ia pertama kali ditanya soal proyek Gedung Baru DPR. "Makanya saya bingung karena dari surat KPK, saya dipanggil untuk dimintai keterangan terkait tersangka AU (Anas Urbaninggrum, red) dalam proyek Hambalang dan lainnya," katanya.

Hubungan Anas dengan proyek gedung baru DPR baru diketahui Marzuki dari penyidik. "Belakangan saya dikasih tahu penyidik kenapa saya dipanggil dalam konteks AU. Karena diindikasikan AU terlibat juga dalam proyek gedung baru DPR," tambah Marzuki.

Kepada penyidik, Marzuki menyatakan, pernah didatangi Machfud Suroso, sekarang tersangka kasus Hambalang, yang mengaku sebagai orang dekat Anas.

Machfud datang untuk mengenalkan diri sebagai orang yang kenal lama dan lebih dekat dengan Anas dibandingkan Anas dengan Nazaruddin, mantan Bendahara Umum PD yang juga menjadi tersangka kasus korupsi. "Jadi belum bicara soal proyek gedung baru DPR," katanya.

Marzuki mengaku telah menjelaskan panjang lebar kepada penyidik mengenai proyek gedung baru DPR. "Sejak awal saya tahu, sampai akhirnya saya putuskan dihentikan proyeknya," katanya.

Awalnya, ada anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) yang melapor bahwa ada pembagian uang terkait proyek gedung baru, tapi tidak kebagian. Marzuki marah. Ia menelepon Menneg BUMN saat itu, Mustafa Abubakar. "Saya bilang enggak benar karena proyek belum jalan sudah bagi-bagi uang. Anak buah Bapak (Mustafa Abubakar, red) rusak, belum apa-apa sudah main bagi-bagi uang dan jumlahnya banyak," tambahnya.

> **Hubungan Anas dengan proyek gedung baru DPR baru diketahui Marzuki Alie dari penyidik**

Marzuki juga menolak anak buah Mustafa yang hendak bertemu. Lantas ia juga melapor ke Presiden SBY soal permainan di proyek ini. "Saya akhirnya mengevaluasi proyek gedung baru karena waktu itu beritanya santer sekali. Oleh-oleh mengarah ke saya sebagai Ketua BURT," katanya.

Marzuki meminta anggaran proyek yang diputuskan DPR periode sebelumnya sebesar Rp 1,8 triliun- dikaji. Namun, Kebiro Pemeliharaan Bangunan dan Instalasi DPR, Sumirat, hanya bisa mengefisienkan menjadi Rp 1,5 triliun. Sumirat akhirnya diganti.

Marzuki juga mengaku telah meminta Menteri PU Joko Kirmanto menugaskan pejabat eselon dua untuk memegang proyek pembangunan gedung baru. Syaratnya, orangnya idealis, tidak makan uang negara.

Akhirnya Ir Ery Saptaria Achyar dari PU yang terpilih dan dapat menurunkan anggaran gedung baru menjadi Rp 1 triliun. Namun, saat disampaikan ke rapat BURT dan Badan Anggaran, banyak anggota yang marah dengan efisiensi anggaran. "Saya putuskan proyek ini disetop saja daripada jadi permainan. Belakangan dari PU mengakui banyak sekali uang keluar dan saya tandai yang bermain di proyek ini, siapa yang ngotot," katanya.

Kepada Dahlan Iskan, pengganti Mustafa Abubakar, Marzuki mengaku sempat menyatakan agar Dahlan tidak memakai nama salah satu pejabat di PT Adhi Karya, yang kini menjadi tersangka kasus Hambalang.

"Saya bilang orangnya nakal, harus diberhentikan. Tapi dua kali saya ngomong, malah orang itu naik jabatan jadi Direktur. Ternyata ujung-ujungnya, dia jadi tersangka dan saya lega," kata Marzuki.

Dengar begitu, saya bersyukur, untung saat itu saya telepon Mustafa Abubakar dan akhirnya menghentikan proyek Gedung DPR yang dikerjakan PT Adhi Karya.

Dalam pemeriksaan, Marzuki ditanya apakah ia menerima cek senilai Rp 250 juta. "Tidak saya jawab karena saya tidak tahu dan tidak terima," katanya.

Sedangkan berkaitan dengan Kongres PD, Marzuki ditanya mengenai politik uang di kongres. "Kalau pertanyaan soal kasus Hambalang, tidak saya tanggapi karena saya sama sekali tidak tahu," tambah Marzuki.

Sekali lagi, saya tidak mau berprasangka buruk. Silahkan kalau KPK mau cari-cari atau jerat saya. Silahkan cari bukti-bukti. Dari dulu saya jaga martabat. Saya cari uang melalui bisnis, bukan dari jabatan saya di DPR.

Kaget

Sementara itu, mantan Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Refrizal mengaku tidak mengetahui persis keterlibatan Anas dalam proyek gedung baru DPR. "Terlibat atau tidaknya Anas secara langsung saya tidak tahu," kata Refrizal.

Akan tetapi, Refrizal sempat kaget dengan satu perusahaan yang mengikuti tender proyek gedung baru DPR. Apalagi, perusahaan tersebut bukan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pasalnya, BURT meminta pemenang tender sebaiknya dari perusahaan BUMN. "Saya memang salah satu wakil ketua BURT saat itu. Ada lima calon pemenang, hanya empat yang saya kenal, tapi siapa yang satu ini, perusahaan aneh kok bisa lolos verifikasi," ujarnya.

Menurutnya, tidak lama setelah itu ada penangkapan di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kempora). Refrizal menambahkan, pimpinan BURT akhirnya memutuskan menghentikan pembangunan gedung baru DPR.

Adapun, kelima perusahaan yang lolos seleksi tahap awal tender gedung baru DPR adalah PT KSO Adhi Karya-Wika, PT PP (Persero), PT Hutama Karya, PT Waskita Karya, dan PT Duta Graha Indah Tbk (DGI). Selanjutnya, Direktur PT DGI terlibat kasus suap proyek Kempora. [J-9/C-6/E-11]



DOK SP

Anas Urbaningrum